

BAB I

LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

1.1. Latar Belakang

Sejak bulan Juli 1997, krisis keuangan melanda negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Dalam situasi rupiah yang terdepresiasi, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan rupiah dengan melaksanakan reformasi berdasarkan kesepakatan dengan IMF. Pada tanggal 1 November 1997, Pemerintah melikuidasi 16 bank yang tidak sehat. Kemudian, pada tanggal 27 Januari 1998, Pemerintah mengeluarkan jaminan atas kewajiban terhadap semua depositan dan kreditur bank-bank yang berbadan hukum Indonesia agar tidak terjadi kepanikan dan penarikan dana besar-besaran oleh depositan. Pada tanggal 4 April 1998, Pemerintah kembali membekukan 7 bank lainnya di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), suatu badan yang didirikan Pemerintah melalui Keppres R.I No. 34 Th. 98, tanggal 5 Maret 1998, untuk menstabilkan situasi perbankan nasional.

Pada tanggal 21 Agustus 1998 Pemerintah mengambil alih kepemilikan 4 bank dan membekukan operasi 3 bank swasta nasional serta menetapkan akan digabungkannya (*merger*) 4 bank Persero menjadi satu bank yang disebut Bank Mandiri.

Sebelumnya, pada awal bulan Februari 1998, melalui PP No. 38/1998, otoritas moneter mewajibkan bank untuk memenuhi persyaratan modal disetor menjadi Rp 1 triliun pada akhir tahun 1998. Jumlah tersebut harus ditingkatkan lagi menjadi Rp 2 triliun pada akhir tahun 2000 dan menjadi Rp 3 triliun pada akhir tahun 2003. Tetapi Pemerintah kembali mengumumkan untuk memperbolehkan bank memiliki modal disetor hanya Rp 250 miliar hingga akhir tahun 1998 ini, jika kualitas aktiva produktifnya baik.

Ketentuan penting Pemerintah dikeluarkan kembali pada tanggal 29 September 1998 dengan menggolongkan bank kedalam tiga kategori yaitu A adalah bank yang memiliki CAR 4 % atau lebih, kategori B adalah bank dengan CAR antara minus 25 % sampai dengan 4 %, dan kategori C adalah bank dengan CAR kurang dari minus 25 %. Bank yang termasuk dalam kategori B diharuskan mengikuti program rekapitalisasi, yang antara lain mensyaratkan bank untuk menyiapkan rencana bisnis (*business plan*) dan menyediakan dana minimum sebesar 20% dari tambahan modal yang diperlukan untuk mencapai CAR sebesar 4%. Bank yang termasuk dalam kategori A tidak diikutsertakan dalam program rekapitalisasi. Sedangkan, bank kategori C diberi kesempatan selama 30 hari untuk melakukan setoran modal atau memperbaiki kualitas aktiva produktifnya agar dapat dimasukkan dalam kategori B.

Pemerintah telah melakukan *due diligence* terhadap seluruh bank dan hasilnya antara lain digunakan sebagai dasar untuk mengetahui posisi masing-masing bank dalam 3 kategori di atas. Pada tanggal 13 Maret 1999, pemerintah mengumumkan bank-bank yang terpilih untuk ikut serta program rekapitalisasi setelah *business plan* mereka di-*review* oleh BI. Bagi bank-bank dari kategori B dan C yang tidak masuk dalam program rekapitalisasi telah dilikuidasi dan diambil alih oleh pemerintah.

Program rekapitalisasi perbankan tersebut diperkirakan memerlukan dana hingga Rp 414 triliun (US\$ 59 miliar) yang akan diperoleh pemerintah dengan menerbitkan obligasi. Sampai saat ini pemerintah telah menerbitkan obligasi bernilai total Rp 322,1 triliun. Sekitar Rp 218,3 triliun merupakan pembayaran tagihan pemerintah di BI dalam rangka BLBI yang terdiri Rp 164 triliun untuk BLBI dan Rp 53,8 triliun merupakan obligasi dalam rangka penjaminan pemerintah terhadap dana nasabah. Sedangkan obligasi rekapitalisasi perbankan berjumlah Rp 103,8 triliun.

Terdapat beberapa alasan yang membuat tema seputar rekapitalisasi perbankan menarik untuk dikaji saat ini. Proses kelahirannya yang dilatar-belakangi krisis moneter menjadikannya sebagai tumpuan harapan bagi pulihnya roda ekonomi. Skala program yang begitu besar memicu timbulnya berbagai isu mengenai sumber pendanaan, efektivitas, keadilan serta transparansi. Keterlibatan IMF dalam penyelesaian krisis ekonomi di Indonesia, diantaranya krisis perbankan, menjadikan

pelaksanaan program rekapitalisasi bahan telaah dan kajian para pengamat ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional. Selain itu, muncul pula keraguan akan kemampuan bank-bank peserta dalam memenuhi perjanjian rekapitalisasi, termasuk di dalamnya adalah pengembalian dana penyertaan Pemerintah yang begitu besar.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh suatu bank, yang berarti semakin tinggi CAR, akan semakin kuat pula bank tersebut karena memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menampung kerugian.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia berpengaruh besar terhadap kondisi industri perbankan saat ini. Depresiasi Rupiah terhadap mata uang asing terutama USD telah mengakibatkan perusahaan yang mempunyai pinjaman dari bank dalam USD menghadapi masalah. Mereka tidak mampu membayar pinjaman dalam USD sehingga menjadi pinjaman bermasalah. Selain itu, tingginya suku bunga yang telah dialami dunia perbankan sejak awal krisis ekonomi juga mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah. Dengan meningkatnya kredit bermasalah dan tingginya *cost of fund*, bank-bank di Indonesia mengalami *negative spread* yang pada akhirnya berpengaruh pada kecukupan modal atau CAR.

Masalah-masalah tersebut juga dihadapi oleh BII yang pada akhirnya mengakibatkan CAR turun menjadi – 15 % dan membawa BII untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan.

CAR	1997	1998
Ketentuan BI	9%	4%
BII	11%	-15%

TABEL 1.1 : Kesesuaian CAR BII dengan Ketentuan BI Selama Dua Tahun Terakhir

Due diligence yang dilakukan oleh Pemerintah menempatkan BII sebagai salah satu bank peserta program rekapitalisasi. BII memerlukan penambahan modal sebesar Rp 11,114 triliun agar CAR-nya mencapai 4 %, dimana minimal 20 % diantaranya harus disetor oleh pemegang saham lama dan sisanya akan ditanggung oleh pemerintah sebagai penyertaan yang harus dikembalikan selambat-lambatnya tiga tahun.

Bagi bank peserta program rekapitalisasi pengembalian penyertaan Pemerintah ini menjadi masalah yang sangat penting. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank antara lain adalah :

- ✓ Pemegang saham lama membeli sebagian atau seluruh saham Pemerintah dengan hak opsi

- ✓ Menggunakan hasil penagihan kredit dan penjualan aset yang telah diserahkan ke *Assets Management Unit* BPPN untuk membeli sebagian atau seluruh saham pemerintah

Sebagai perusahaan publik, penambahan modal dilakukan melalui *mekanisme right issue*. Yang menarik dalam *right issue* ini adalah pemberian waran, yang dalam hal ini disebut sebagai Waran Seri II, bagi para pemegang saham yang menggunakan HMETD-nya (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/*right*).

Selain itu, pada penawaran umum terbatas sebelumnya, yaitu Penawaran Umum terbatas II, perseroan juga telah menerbitkan Waran Seri I yang memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 17 Januari 2000.

Tesis ini akan mengkaji peranan strategis dan manfaat penerbitan Waran Seri II dan Waran Seri I tersebut bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan BII, yaitu para pemegang saham, perseroan serta Pemerintah.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bahwa industri perbankan adalah suatu bidang usaha yang selalu memerlukan modal untuk pengembangan usahanya. Sebagai bank publik, mekanisme penambahan modal yang

dilakukan oleh BII harus melalui penawaran umum terbatas dengan memanfaatkan instrumen-instrumen pasar modal yang ada seoptimal mungkin.

Dengan mengkaji manfaat serta dampak strategis penerbitan waran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan BII pada akhirnya diharapkan dapat diketahui apakah penerbitan waran oleh BII merupakan langkah yang tepat sehingga dapat digunakan sebagai model bagi bank-bank publik lain atau malah sebaliknya merupakan langkah yang keliru sehingga harus dihindari.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai bank publik, BII telah melakukan *right issue* untuk menambah modal sebanyak 3 kali, yaitu sbb. :

a) Penawaran Umum Terbatas I

Penawaran ini dilaksanakan tanggal 31 Januari 1994 dan hasilnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dalam pemberian pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

b) Penawaran Umum Terbatas II

Penawaran ini dilaksanakan tanggal 2 Januari 1997 dan hasilnya digunakan untuk :

- ✓ Mendukung kegiatan operasional dalam pemberian pinjaman jangka menengah dan jangka panjang
- ✓ Meningkatkan penyertaan pada anak perusahaan dan pembentukan anak perusahaan baru
- ✓ Perluasan jaringan kantor
- ✓ Investasi dalam teknologi informasi

Pada Penawaran Umum Terbatas II ini diterbitkan waran yang diberi nama Waran Seri I

c) Penawaran Umum Terbatas III

Penawaran ini dilaksanakan dua kali yaitu Penawaran Umum terbatas II pada tanggal 16 Maret 1999 dan Penawaran Umum Terbatas III Lanjutan pada tanggal 30 Juni 1999. Hasil dari penawaran ini seluruhnya digunakan untuk memperbaiki rasio kecukupan modal (CAR) sehingga menjadi minimum 4 % seperti yang disyaratkan Pemerintah dalam program rekapitalisasi perbankan.

Terlihat bahwa Penawaran Umum Terbatas I dan II tidak berkaitan dengan program rekapitalisasi perbankan karena dilaksanakan sebelum krisis ekonomi terjadi di Indonesia dan oleh karena itu berada di luar lingkup pembahasan. Namun demikian, penerbitan Waran Seri I pada Penawaran Umum Terbatas II ini akan dibahas karena

memiliki dampak pada CAR apabila pemegang saham yang bersangkutan melaksanakan haknya dan Penawaran umum Terbatas II tersebut dilakukan hanya 7 bulan sebelum Indonesia dilanda krisis ekonomi pada bulan Juli 1997. Pembahasan mengenai hal ini tidak akan mendalam karena asumsi-asumsi yang dibuat pada saat penerbitannya jauh dari kenyataan yang terjadi sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi.

Sedangkan Penawaran Umum Terbatas III yang memang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pemerintah mengenai program rekapitalisasi termasuk dalam lingkup pembahasan. Namun demikian, mengingat program rekapitalisasi perbankan sangat luas cakupannya, maka penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada penerbitan Waran Seri II.

Pembahasan mengenai prediksi harga saham/waran tidak dilakukan mengingat makalah tidak ditujukan untuk analisa investasi melainkan lebih pada pengkajian manfaat dan nilai strategis penerbitan waran dalam kaitannya dengan program rekapitalisasi perbankan.